

ABSTRAK

POTENSI INVESTASI KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Oleh

NORMA OKTARIA

Kebutuhan tenaga listrik diperkirakan meningkat pesat dan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pemerintah, sehingga dipandang perlu untuk melibatkan swasta. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satu perubahan signifikan terkait ketenagalistrikan nasional sebagaimana pada sub tema ketenagalistrikan yang terdapat dalam Pasal 42 yang mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru dalam Undang-undang Ketenagalistrikan. Pembahasan yang dilakukan dalam tesis ini adalah potensi investasi ketenagalistrikan di Indonesia pasca Perpu Cipta Kerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber pada norma hukum positif dan doktrin, dalam hal ini undang-undang yang akan dikaji adalah Pasal 42 Perpu Cipta Kerja terkait beberapa perubahan dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil pembahasan mengemukakan bahwa pengaturan mengenai potensi investasi ketenagalistrikan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992 melalui Keputusan Presiden tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta hingga saat ini. Potensi investasi ketenagalistrikan dilakukan melalui syarat dan skema yang didasarkan pada aturan yang berlaku pada masanya. Pembaruan yang dibawa oleh Perpu Cipta Kerja jo. Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah bahwa investasi ketenagalistrikan termasuk dalam bidang usaha terbuka untuk penanaman modal. Yang mana sebelumnya berdasarkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, investasi ketenagalistrikan termasuk dalam bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Kata kunci: Cipta Kerja, Investasi, Ketenagalistrikan.

ABSTRACT**THE INVESTMENT POTENTIAL IN THE ELECTRICITY SECTOR IN
INDONESIA POST-OMNIBUS LAW**

**By
NORMA OKTARIA**

The demand for electricity is projected to increase rapidly and may not be fully met by the government, hence the necessity to involve the private sector. Omnibus Law facilitates the public, especially entrepreneurs, in obtaining business permits in the Energy and Mineral Resources sector by altering, removing, or establishing new regulations. One significant change is related to the national electricity sector, as seen in the subsection on electricity within Article 42, which revises several provisions stipulated in Electricity Law. In this regard, the discussion in this thesis will focus on the investment potential in the electricity sector in Indonesia post Omnibus Law.

The research method employed is normative juridical, emphasizing on written legal norms found in legislation derived from positive legal norms and doctrines, particularly focusing on Article 42 of the Omnibus Law regarding several changes in provisions stipulated in Electricity Law. This research is descriptive in nature with a legal and conceptual approach.

The results of the discussion suggest that regulations regarding the investment potential in the electricity sector in Indonesia have been initiated since 1992 through Presidential Decree concerning Private Electricity Provision Enterprises up to the present through the Omnibus Law. Investment potential in the electricity sector is conducted through conditions and schemes that depend on the rules during the period of the prevailing Electricity Law. The updates brought by the Omnibus Law in conjunction with Presidential Regulation concerning Investment Field are that electricity investment is included in the open investment field. Previously, based on Presidential Regulation concerning the List of Closed Business Fields and Open Business Fields with Requirements in the Investment Field, electricity investment was included in the open business field with requirements.

Keywords: Electricity, Investment, Omnibuslaw.